



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 16 Juli 2021

Halaman: 4

Penekanan Mobilitas Jadi Kunci Setop Persebaran Covid-19

TAJUK

Berdasarkan hasil evaluasi digelaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli lalu, ternyata penurunan angka mobilitas masyarakat masih rendah. Dari Google Traffic, sebelum PPKM Darurat diberlakukan, masyarakat yang tinggal di rumah ada sebanyak 15%, lalu saat diberlakukannya PPKM Darurat meningkat jadi 20%. Dengan begitu penambahannya hanya sekitar 5%.

Sementara data berbeda justru diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan zona merah wilayah Jawa Tengah (Jateng dan DIY) penurunan mobilitasnya antara 10-20%, kemudian daerah yang berwarna kuning 20-30%.

Terlepas dari itu, angka penambahan itu jelas tak cukup untuk mengoptimalkan tujuan PPKM Darurat, yakni menekan angka mobilitas masyarakat guna mencegah penularan Covid-19. Terlebih, dari hasil kajian pemerintah, setidaknya diperlukan 70% dari populasi pembatasan mobilitas, barulah PPKM Darurat tersebut bisa berdampak signifikan.

Terkait dengan hal ini, epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad, meminta Pemda DIY tegas dalam menerapkan PPKM Darurat. Setidaknya, penambahan yang hanya 5% tersebut menjadi bukti bahwa implementasi PPKM darurat di lapangan belum cukup kuat.

Penerapan PPKM Darurat seharusnya tidak hanya sebatas menutup akses lalu lintas atau jalan untuk menghentikan mobilitas. Lebih dari itu, diperlukan juga rekayasa sosial agar masyarakat bisa patuh menjalankan protokol kesehatan khususnya terkait dengan pembatasan mobilitas. Menurut Riris, ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan. Itu seperti penindakan hukum yang tegas bagi pelanggarnya. Lalu, berikan bantuan hidup, dengan anggaran yang bisa bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) maupun dana desa, dan sebagainya.

Sementara keputusan Pemda DIY untuk menambah kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 melalui penambahan tiga rumah sakit (RS) lapangan memang bisa menjadi harapan untuk menekan angka penularan Covid-19. Memang, Pemda DIY kini tengah menyiapkan tiga RS lapangan untuk rujukan pasien Covid-19. Ketiga RS itu masing-masing ada di

Rumah Susun ASN Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Caturtunggal, Sleman dengan daya tampung 272 orang; serta dua asrama mahasiswa UGM dan UNY milik Kementerian PUPR dengan kapasitas masing-masing 166 orang.

Dengan tambahan tiga RS itu, diharapkan persoalan daya tampung pasien Covid-19 bisa sedikit terselesaikan. Menilik data Pemda DIY per 13 Juli 2021, tingkat keterisian tempat tidur (*bed occupancy rate/ BOR*) di seluruh ranjang rumah sakit rujukan di DIY telah mencapai 98,42%.

Rinciannya, tempat tidur kritis rumah sakit rujukan dari total kapasitas 146, per 13 Juli 2021 menyisakan 18 ranjang atau sudah terisi 87,67%. Sementara untuk kategori nonkritikal masih tersisa enam *bed* dari total daya tampung 1.376 atau terisi 99,59%.

Terlepas dari apapun upaya pemerintah, angka kasus Covid-19 di DIY mustahil menurun jika tidak dibarengi dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Jika masalah mobilitas ini tidak segera diselesaikan, maka kasus Covid-19 niscaya akan terus melonjak.

Akibatnya, DIY pun akan tetap terus kekurangan *bed*, oksigen hingga sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Netral	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
	☐ Biasa	☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005